

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Keadaan Desa

a. Sejarah

Sejarah Desa Kediren bermula dari keberadaan Kerajaan Mataram ketika di wilayah Kerajaan Mataram terjadi huru-hara seperti perang. Banyak warga Mataram seperti ulama, prajurit, abdi dalem meninggalkan Mataram menuju ke timur tepatnya di daerah gunung Lawu sebelah timur Magetan dan sekitarnya.

Pada suatu hari datanglah seorang pemuda dari Kediri. Pemuda tersebut disertai sesepuh dukuh menjelajah ke seluruh wilayah pendukuhan antara lain sampai di suatu tempat yang tinggi. Tempat itu sekarang menjadi Dukuh Sepuntuk. Penjelajahan mereka sampai juga di tempat yang rendah dimana tanahnya lembek, banyak mengandung air. Tempat itu sekarang menjadi Dukuh Ledok. Setelah menempuh perjalanan jauh, sang pemuda bersama sesepuh berhenti di suatu tempat untuk beristirahat (Bhs. Jawa Leren). Untuk menandai kejadian itu mereka memberi nama tempat itu **Kediren** (berasal dari kata asal pemuda yaitu Kediri dan Leren).

Tidak selang lama datang lagi warga Kerajaan Mataram yang kedua yaitu seorang putri Kedi bernama Raden Roro Tumpi bersama dua orang laki-laki yaitu Surenggono dan Sorengpati. Setelah melakukan perjalanan jauh dari Mataram sampailah di suatu tempat yang masih berupa hutan untuk pemukiman. Setelah selesai membuka hutan (babat hutan) Surenggono dan Sorengpati berkehendak memberi nama tempat pemukiman barunya untuk mengenang Roro Tumpi sebagai seorang putri, sepakat tempat tersebut diberi nama **Kediren** (berasal dari kata putri Kedi dan Leren).

Selanjutnya atas persetujuan dari para sesepuh dukuh tempat mereka bermukim, dukuh-dukuh tersebut disatukan menjadi sebuah desa yang diberi nama **Desa Kediren**.

Para Pejabat Bekel atau Kades Kediren dari awal berdiri yaitu:

- 1) Bpk. Magunsentono, masa jabatan 1819-1884
- 2) Bpk. Soeratman, masa jabatan 1884-1917
- 3) Bpk. Kromoredjo, masa jabatan 1917-1933
- 4) Bpk. Sonodrono, masa jabatan 1933-1944
- 5) Bpk. Martoharjo Sadimin, masa jabatan 1945-1969
- 6) Bpk. Senoen, masa jabatan 1970-1987
- 7) Bpk. Samingoen, masa jabatan 1988-2006
- 8) Bpk. Rasit, S.Pd, masa jabatan 2006-2013

9) Bpk. Dwi Heri Susanto, A.Md Kep, masa jabatan 2014-2019

10) Bpk. Dwi Heri Susanto, S.Kep. Ners, masa jabatan 2019-sekarang

b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara administratif, Desa Kediren terletak di wilayah Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga.

Bagian Utara : Desa Tapen Kecamatan Lembeyan

Bagian Selatan : Hutan Jati Sampung Kecamatan Sampung

Bagian Barat : Desa Pragak Kecamatan Parang

Bagian Timur : Kelurahan Lembeyan Kulon

Jarak Desa Kediren ke Kecamatan Lembeyan yaitu 3 km, yang bisa ditempuh menggunakan motor selama seperempat jam. Sedangkan jarak ke pusat kabupaten yaitu 20 km, yang bisa ditempuh selama sejam. Kondisi topografis Desa Kediren yaitu dekat bantaran sungai jarak 200 meter di atas permukaan laut, suhu udara rata-rata 31°C. Luas Desa Kediren 6.392,00 Ha yang terbagi menjadi 3 Dusun, 3 RW dan 20 RT yaitu:

1) Dusun Selungguh meliputi RW 01 mulai RT 01-RT 08

2) Dusun Sekadalan meliputi RW 02 mulai RT 09-RT 14

3) Dusun Ledok meliputi RW 03 mulai RT 15-RT 20

c. Jumlah Penduduk

Dilihat dari data administrasi tahun 2020, jumlah penduduk Desa Kediren ada 1.124 KK, jumlah seluruh penduduk 3.272 jiwa, dengan rincian 1.631 laki-laki dan 1.641 perempuan. Dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Data Jumlah Penduduk Desa Kediren Tahun 2020

Kriteria Penduduk	Jumlah
Laki-Laki	1.631 orang
Perempuan	1.641 orang
Kepala Keluarga	1.124 KK
Kepadatan penduduk	916,63 per KM

Sumber: Prodeskel Desa Kediren 2020, diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.1 diperoleh data menunjukkan bahwa jumlah laki-laki 1.631 orang dan perempuan 1.641 orang hanya terdapat selisih 10 orang. Kepadatan penduduk 916,63 per KM.

Tabel 4.2
Data Jumlah Penduduk Menurut Usia Tahun 2020

Usia	Laki	Perempuan	Total
0 – 4	74	79	153
5 – 9	102	70	172
10 – 14	98	93	191
15 – 19	79	93	172
20 – 24	118	113	231
25 – 29	107	106	213
30 – 34	111	125	236
35 – 39	107	126	233
40 – 44	101	114	215
45 – 49	106	114	220
50 – 54	110	115	225

55 – 59	102	95	197
60 – 64	89	89	178
65 – 70	113	101	214
70 keatas	214	208	422
Jumlah	1631	1641	3272

Sumber: Prodeskel Desa Kediren 2020, diolah 2021

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 Desa Kediren sekitar 1348 orang. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Tabel 4.3
Data Agama Penduduk Desa Kediren Tahun 2020

Agama	Laki-Laki	Perempuan
Islam	1630 orang	1640 orang
Kristen	1 orang	1 orang
Katolik	-	-
Hindu	-	-
Budha	-	-
Konghucu	-	-
Jumlah	1.631 orang	1.641 orang

Sumber: Prodeskel Desa Kediren 2020, diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.3 ternyata kebanyakan jumlah penduduk Desa Kediren memeluk agama Islam dan selanjutnya diikuti oleh pemeluk agama Kristen sebanyak 2 orang.

d. Kondisi Ekonomi

Tingkat ekonomi di Desa Kediren paling banyak dalam bidang pertanian. Selain itu, ada juga yang membuka usaha sendiri diantaranya toko, warung, salon dan lain – lain. Dan ada profesi lain seperti guru, PNS, perawat dan lain – lain.

Data di bawah merupakan mata pencaharian masyarakat Desa Kediren dilihat dari profil desa dan kelurahan tahun 2020:

Tabel 4.4
Data Penduduk Sesuai Pekerjaan

Pekerjaan	Total
Pegawai Negeri Sipil	42 orang
TNI atau POLRI	17 orang
Pegawai Swasta	24 orang
Wiraswasta atau Pedagang	948 orang
Petani	2040 orang
Tukang	32 orang
Buruh Tani	92 orang
Peternak	8 orang
Perangkat Desa	11 orang
Lainnya	289 orang
Jumlah	3503 orang

Sumber: Prodeskel Desa Kediren 2020, diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.4 diperoleh data bahwa 2040 orang bermata pencaharian sebagai petani. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat bekerja di sekitar wilayah Desa Kediren yaitu di pertanian. Namun terdapat 17 orang masyarakat bekerja sebagai TNI/POLRI, data ini menunjukkan bahwa pekerjaan masyarakat Desa Kediren sangat bervariasi.

e. Kondisi Pendidikan

Pendidikan adalah faktor penting untuk meningkatkan kemampuan dan SDM yang akan berdampak pada kemajuan tingkat ekonomi masyarakat. Berikut kondisi pendidikan Desa Kediren:

Tabel 4.5
Data Pendidikan Desa Kediren Tahun 2020

Tingkat Pendidikan	Laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	0 orang	0 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/playgroup	72 orang	51 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	224 orang	217 orang
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	0 orang	0 orang
Tamat SD/ sederajat	180 orang	181 orang
Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	180 orang	181 orang
Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	180 orang	100 orang
Tamat SMP/ sederajat	130 orang	100 orang
Tamat SMA/ sederajat	170 orang	195 orang
Tamat D-1/ sederajat	1 orang	0 orang
Tamat D-3/ sederajat	13 orang	20 orang
Tamat S-1/ sederajat	33 orang	38 orang
Tamat S-2/ sederajat	6 orang	6 orang
Tamat S-3/ sederajat	1 orang	0 orang
Tamat SLB A	0 orang	1 orang
Tamat SLB C	1 orang	1 orang
Total	2.282 orang	

Sumber: Prodeskel Desa Kediren 2020, diolah 2021

f. Data Infrastruktur, Sarana dan Prasarana

Kediren mempunyai infrastruktur untuk menunjang berbagai kegiatan. Dapat dilihat dalam tabel di bawah:

Tabel 4.6
Data Sarana serta Prasarana Pendidikan Desa Kediren Tahun 2020

Sarana Serta Prasarana Pendidikan	Total
Taman Bacaan	1 Unit
Perpustakaan Desa	1 Unit
Lembaga Pendidikan Agama	5 Unit
Gedung Tempat Bermain Anak	2 Unit
Bangunan TK	3 Unit
Bangunan Sekolah Dasar	4 Unit
Bangunan Sekolah Menengah Pertama	-
Bangunan Sekolah Menengah Atas	-
Bangunan Perkuliahan	-

Sumber: Prodeskel Desa Kediren 2020, diolah 2021

Masyarakat yang melanjutkan sekolahnya ke SMP dan SMA biasanya mereka melanjutkan ke sekolah yang berada di desa sebelah. Masyarakat yang meneruskan jenjang sarjana biasanya di Ponorogo, Madiun serta Malang. Banyak sarana dan prasarana lainnya di Desa Kediren tahun 2020:

Tabel 4.7
Data Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Kediren Tahun 2020

Sarana dan Prasarana Kesehatan	Total
Puskesmas	-
Posyandu	3 Unit
Balai Pengobatan Masyarakat	1 Unit
Jumlah	4 Unit

Sumber: Prodeskel Desa Kediren 2020, diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa di Desa Kediren terdapat 1 buah balai pengobatan masyarakat dan 3 buah posyandu yang terdapat di setiap dusun.

Tabel 4.8
Data Sarana serta Prasarana Ibadah Desa Kediren Tahun 2020

Sarana Serta Prasarana Ibadah	Total
Masjid	7 Unit
Mushola	26 Unit
Gereja	-
Wihara	
Pura	-
Klenteng	-
Jumlah	33 Unit

Sumber: Prodeskel Kediren 2020, dikelola 2021

Dari tabel 4.8 ternyata di Desa Kediren terdapat 7 buah tempat ibadah yaitu masjid dan mushola yang berjumlah 26 buah. Hal ini dipengaruhi oleh mayoritas besar penduduk Desa Kediren memeluk agama Islam.

Tabel 4.9
Data Sarana serta Prasarana Umum Desa Kediren Tahun 2020

Sarana Serta Prasarana Umum	Total
Tempat Berolahraga	2 Unit
Tempat Seni dan Budaya	2 Unit
Kantor Desa	1 Unit
Pamsimas	1 Unit
Pasar	1 Unit
Lain – lain	

Sumber: Prodeskel Kediren 2020, diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.9 sarana dan prasaran umum yang terdapat di Desa Kediren yaitu sarana olahraga berupa lapangan voli dan sepak bola, kesenian/budaya berupa hadroh dan campursari, terdapat satu buah balai pertemuan yaitu berupa balai desa, pamsimas desa di Dusun Sekadalan, dan satu buah pasar desa di Dusun Ledok.

g. Visi dan Misi Desa Kediren

Visi adalah gambaran mengenal masa depan dan masa sekarang dengan dasar logika dan makna secara bersamaan selanjutnya memberi ilham dan naluri yang masyarakat harapkan dan kebanggaan apabila berhasil. Untuk itulah Pemerintah Desa Kediren dalam mencapai cita-citanya memiliki Visi **“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kediren yang SEHATI (Sehat Ekonomi Maju Harmonis Tertib dan Inovatif)”**.

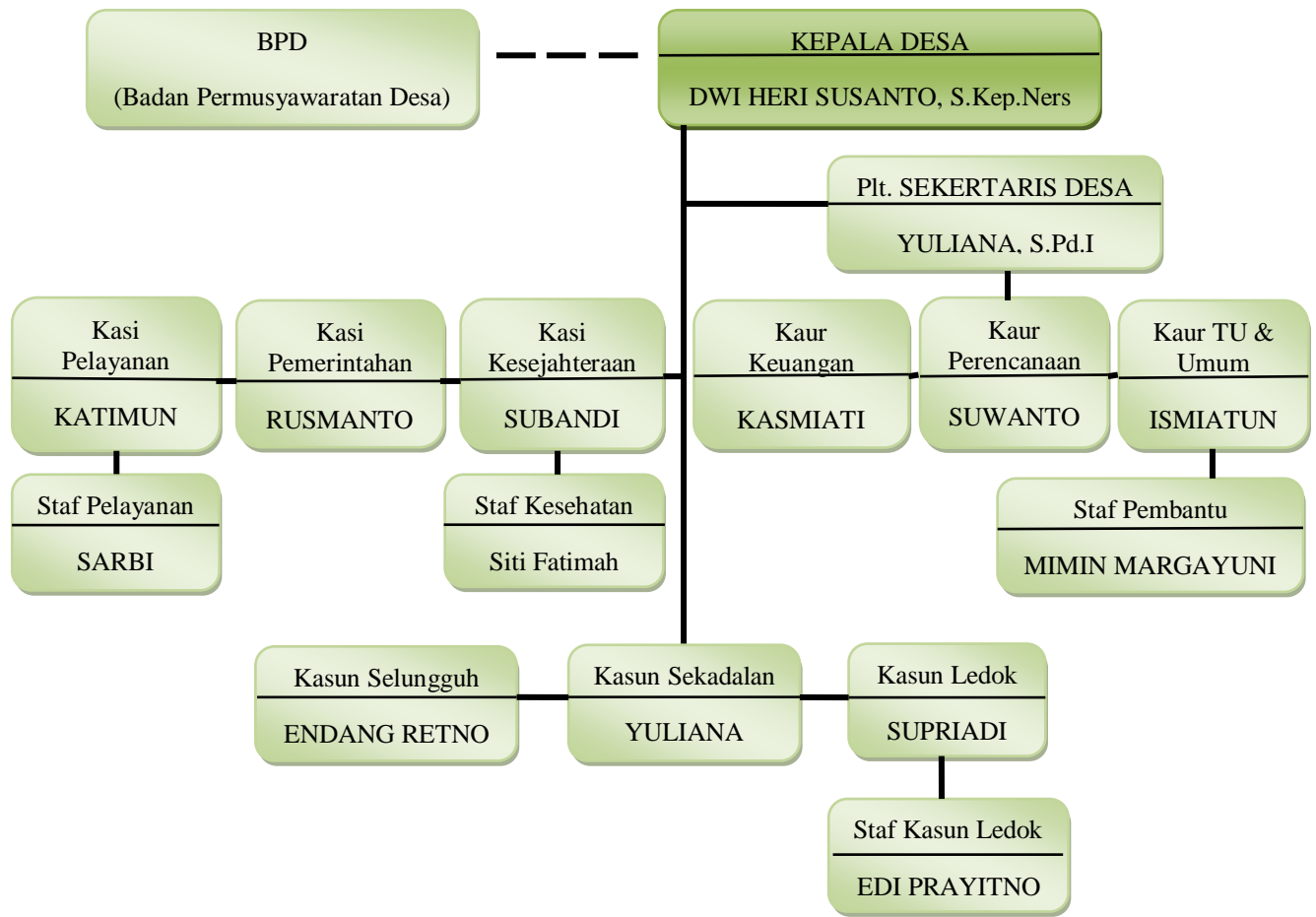
Misi adalah kebutuhan tekad tentang spesifikasi tujuan, arah pemanfaatan sumberdaya dari Visi agar salah satu tujuan atau arah cita-cita yang diinginkan. Maka untuk mencapai Visi di atas Pemerintah Desa Kediren mempunyai Misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Pemerintah Desa yang bersinergis dan berdaya guna.
- 2) Mewujudkan pembangunan ekonomi desa dan sarana prasarana yang berbasis peran serta sumber daya lokal.
- 3) Mewujudkan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat yang inovatif.

h. Struktur Pemerintahan

Struktur pemerintahanan Desa Kediren disusun menyesuaikan Perda Kabupaten Magetan No. 06 Tahun 2006 mengenai Susunan Organisasi serta Tata Kerja Pemerintah Desa. Sedangkan penataan kelembagaan masyarakatnya menyesuaikan Perda Kabupaten Magetan No. 11 Tahun 2006 mengenai Lembaga Masyarakat Desa ataupun Kelurahan. Seperti gambar di bawah:

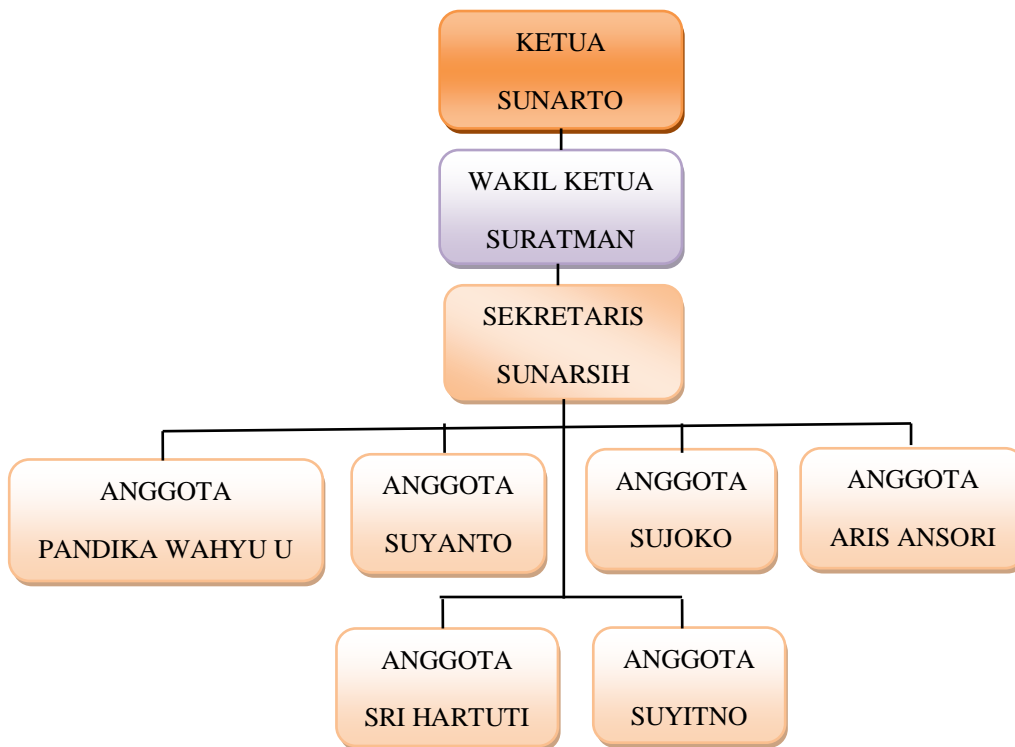
Gambar 4.1
Struktur Organisasi Desa Kediren



Keterangan : Jalur Komando
 Jalur Koordinasi

Sumber : Balai Desa Kediren

Gambar 4.2
Struktur Organisasi BPD



Keterangan : ————— Jalur Komando
 - - - - - Jalur Koordinasi

Sumber : Balai Desa Kediren

i. Deskripsi Tugas serta Wewenang Pemerintahan Desa

1) Kepala Desa

Wewenang Kades diantaranya:⁵²

- a) Pemimpin Masyarakat.
- b) Menunjuk serta menghentikan aparatur desa.

⁵² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 “*Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pasal 26 Ayat (1)*”

- c) Berkuasa atas anggaran serta kekayaan Desa.
- d) Menyetujui APBDesa.
- e) Pembina untuk meningkatkan ekonomi dan integrasi untuk mewujudkan perekonomian skala produktif demi kemakmuran masyarakat.

2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah salah satu tokoh masyarakat yang dipilih secara demokrasi, yang memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Menyetujui Rancangan Perdes dengan Kades.
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c) Pengawasan terhadap kades.

3) Sekertaris Desa

Sekertaris Desa dibantu 3 orang aparat desa dengan sebutan kepala urusan disingkat kaur. Sekertaris Desa merupakan koordinator kaur saat bertugas sekertariat desa bertanggung jawab melakukan administrasi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan serta pembinaan masyarakat beserta administrasi lainnya yang berada di bawah tugasnya. Kaur ada tiga yaitu:

- a) Kaur TU memiliki tugas serta fungsi dalam tata usaha. Contoh administrasi, pengarsipan berkas dan lain – lain.
- b) Kaur Perencanaan memiliki tugas menyusun rancangan APBDesa. Mengumpulkan serta mengevaluasi kebutuhan

pembangunan. Kepala urusan Perencanaan juga melaksanakan pengawasan dalam menyusun LPJ.

- c) Kaur Keuangan bertugas mengelola anggaran, baik penerimaan maupun pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja desa. Dan membuat pembukuan serta LPJ anggaran.

4) Pelaksana Teknis (Kasi)

- a) Kepala seksi Pemerintahan bertugas membantu kepala desa saat kegiatan operasional. Melakukan tata pemerintahan, menyusun perdes terkait tata ruang, perbatasan serta membina permasalahan tanah. Kepala seksi Pemerintahan melakukan operasional administrasi penduduk serta mendata dan membuat prodeskel.
- b) Ketua seksi Kesejahteraan membantu pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana beserta prasarana, perekonomian desa, kesehatan serta pendidikan. Kepala seksi Kesejahteraan melakukan sosialisasi serta motivasi sosial dan kebudayaan, lingkungan hidup serta organisasi masyarakat contoh karang taruna, PKK.
- c) Kepala seksi Pelayanan bertugas melakukan penyuluhan serta motivasi hak dan kewajiban masyarakat, melestarikan nilai sosial kebudayaan, tenagakerja serta keagamaan.

5) Kepala Dusun (Kasun)

Wilayah yang disebut dusun dipimpin Kepala Dusun. Per dusun dibagi dalam beberapa satuan wilayah yang lebih kecil dengan sebutan RW. Sedangkan RW dibagi lagi di wilayah paling kecil Desa disebut RT. Ketua RW serta RT ditunjuk masyarakat setempat dengan cara musyawarah. Ketua RW serta RT ditetapkan bersama SK Kades.

Kasun bertugas membantu kades di setiap wilayahnya. Diantaranya tugas administrasi pemerintah, penduduk, pembangunan, pemberdayaan serta program pembinaan masyarakat. Kasun tidak bisa menjadi pelaksana realisasi anggaran tapi bisa jadi anggota timlak untuk pengadaan barang atau jasa yang tidak bisa dilakukan oleh pelaksana kegiatan seperti Kepala seksi atau Kepala urusan.

2. Rencana Kerja Pemerintah Desa

Rencana jangka pendek atau RKP Desa merupakan hasil musdes terkait perencanaan yang akan direalisasikan dalam jangka waktu 1 tahun. Dalam penyusunan diawali dengan musyawarah dusun (musdus) yang dipimpin oleh kepala dusun (kasun) untuk menjaring aspirasi masyarakat. Setelah musdus selesai dilanjutkan koordinasi diantaranya LPM, BPD, PKK, Karang Taruna, Kasun, RT, RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, pihak kecamatan dan perangkat desa. Kemudian dilakukannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

(Musrenbangdes) dan disepakati bersama BPD Desa Kediren selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. RKP Desa Kediren akan menjadi dasar penetapan APBDesa. Jumlah peserta Musrenbang Desa yaitu:

Tabel 4.10
Daftar Hadir Musrenbangdes Kediren

No	Keterangan	Total
1	Kades	1
2	Seluruh Perangkat	13
3	BPD	9
4	LPM	6
5	RT	20
6	RW	3
7	Pihak Kecamatan	4
8	Tokoh Masyarakat	8
	Jumlah	64

Sumber: Data Sekunder yang diolah peneliti

Sehubungan dengan Pandemi Covid – 19 yang terjadi di Indonesia khususnya di Desa Kediren maka Pemerintah Desa Kediren melakukan penambahan kegiatan untuk penanggulangan dan pencegahan bencana Covid – 19. Adapun rumusan prioritas kebijakan pembangunan Desa Kediren Kecamatan Lembeyan untuk jangka waktu 1 tahun secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

Tabel 4.11
**Daftar Prioritas Program dan Kegiatan Desa Kediren
 Tahun 2020**

No	Bidang	Prioritas
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a) Penghasilan tetap Kades beserta Perangkat
		b) Tunjangan Kades beserta Perangkat
		c) Tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
		d) Tunjangan BPD
		e) Kegiatan operasional BPD
		f) Penyelenggaraan operasional Pemerintahan Desa
		g) Kegiatan operasional RT/RW
		h) Kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa
		i) Kegiatan pengelolaan informasi Desa
		j) Kegiatan penyusunan profil Desa
		k) Kegiatan pembangunan sarana prasarana kantor Desa
		l) Kegiatan pengisian perangkat Desa
		m) Kegiatan intensifikasi pajak bumi dan bangunan
2	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa	a) Pemeliharaan jalan desa 3 Kasun
		b) Pembangunan rabat beton RT 18
		c) Rehab balai desa
		d) Pasimas
		e) Penanggulangan Covid – 19
3	Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang Pendidikan	a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/Madrasah Non Formal milik Desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional, dst)
4	Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang Kesehatan	a) Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, intensif kader posyandu)
5	Kegiatan Penguatan dan Permodalan BUMDes	a) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD/UMKM
		b) Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi
6	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	a) Kegiatan pembinaan lembaga adat
		b) Kegiatan PKK
		c) Fasilitasi kegiatan urusan ke masyarakat
		d) Kegiatan menunjang pendidikan dan keagamaan
		e) Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa
		f) Selamatan adat (suran)
		g) Kegiatan menunjang kesehatan dan kesejahteraan keluarga
		h) Operasional Tp PKK dan Kader – Kader PKK (bidang umum)
		i) Kegiatan Pokja I
		j) Kegiatan Pokja II
		k) Kegiatan Pokja III

		l) Kegiatan IV
		m) Festival kesenian adat
7	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	a) Mengadakan kegiatan kesenian dan kebudayaan serta keagamaan
		b) Membina kerukunan umat beragama
		c) Mengadakan pembinaan lembaga adat
		d) Meningkatkan kualitas aparatur desa
		e) Meningkatkan kualitas Badan Permusyawaratan Desa
		f) Sosialisasi pemberdayaan perempuan
8	Bidang Tak Terduga	a) Belanja tak terduga covid – 19
		b) Pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) masyarakat yang terdampak covid – 19

Sumber: Perdes Kediren No. 7B tahun 2020 tentang Perubahan RKP Desa

Kediren tahun 2020

3. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

a. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa. Bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Kediren Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.766.387.100,- yang berasal dari:

Tabel 4.12
APBDesa Kediren Tahun 2020

	Uraian	Anggaran (Rp.)
A	Pendapatan	
	PAD	262.920.000
	DD	820.685.000
	DBHPRD	37.675.000
	ADD	462.874.100
	Bantuan Keuangan Kabupaten	182.233.000
Jumlah Pendapatan		1.766.387.100
B	Belanja	
	a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	850.745.748
	b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	600.196.900
	c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	96.040.800
	d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	58.203.652
	e) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak	158.078.523
Jumlah Belanja		1.763.265.623
Surplus / (Defisit)		3.121.477
C	Pembiayaan	
	a) Penerimaan Pembiayaan	6.878.523
	b) Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)		(3.121.477)

Sumber: Data Laporan APBDes

b. Kebijakan Belanja Desa

70% untuk belanja pembangunan dan kemasyarakatan, diantaranya kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan. 30% belanja pendapatan lain untuk Aparatur Desa.

B. Temuan Penelitian

Penjelasan berikut merupakan hasil wawancara dengan Bapak Dwi Heri Susanto, S.Kep.Ners selaku kepala desa, Ibu Yuliana, S.Pd.I selaku sekretaris dan Ibu Kasmiasi selaku bendahara. Adapun dapat dipaparkan data hasil penelitian dan analisis sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan Desa Kediren Sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Mengenai pengelolaan anggaran Desa Kediren peneliti menanyakan. Bersumber dari mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kediren?

Adapun sumber pendapatan desa menurut Ibu Kasmiasi ialah berikut:

“Sumber dana satu dari PAD (Pendapatan Asli Desa) terus yang kedua dari Pendapatan Dana Transfer seperti DD, ADD, DBHPRD terus yang ketiga bantuan keuangan dari Kabupaten ataupun Provinsi.”⁵³

Sedangkan Bapak Heri menambahkan bahwa:

“Sumber pemasukan itu pertama PAD terus DD terus dari DBHPRD itu bagi hasil pajak mbak.”⁵⁴

Kemudian Ibu Yuliana mengatakan:

“Dari transfer terus PAD mbak.”⁵⁵

⁵³ Wawancara, Ibu Kasmiasi selaku Bendahara Desa pada Senin, 22 Maret 2021

⁵⁴ Wawancara, Bapak Heri selaku Kepala Desa pada Senin, 22 Maret 2021

⁵⁵ Wawancara, Ibu Yuliana selaku Sekretaris Desa pada Selasa, 16 Maret 2021

Digunakan untuk apa anggaran yang telah diterima dari pemerintah?

Ibu Kasmiasi mengatakan:

“Untuk penyelenggaraan pemerintah, realisasi pembangunan, terus pembinaan masyarakat, terus yang ke empat untuk bidang pemberdayaan masyarakat, bidang yang kelima bidang penanggulangan bencana atau darurat.”⁵⁶

Jawaban tersebut hampir sama dengan yang diungkapkan Ibu Yuliana yakni:

“Empat bidang yaitu pembangunan, pemberdayaan, pemerintahan terus pembinaan.”⁵⁷

Tambahan lagi terkait dana desa oleh Bapak Heri, mengatakan:

“Kalau dana desa itu kan sudah ada wadahnya yang pertama buat pemberdayaan terus pembangunan terus pemerintahan satunya pembinaan.”⁵⁸

Sesuai dengan Permedagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang proses pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Permendagri tersebut sebagai dasar pemerintah desa untuk melakukan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Sehingga berkaitan dengan hal ini proses pengelolaan keuangan desa Kediren dapat dijelaskan melalui wawancara sebagai berikut:

⁵⁶ Wawancara, Ibu Kasmiasi selaku Bendahara Desa pada Senin, 22 Maret 2021

⁵⁷ Wawancara, Ibu Yuliana selaku Sekretaris Desa pada Selasa, 16 Maret 2021

⁵⁸ Wawancara, Bapak Heri selaku Kepala Desa pada Senin, 22 Maret 2021

a. Perencanaan

Pertanyaan pertama adalah bagaimana tahap awal dalam proses perencanaan hingga penganggaran APBDesa di Kediren.

Ibu Yuliana mengatakan:

“Semua itu musyawarah mbak. Misalnya per dusun, dimulai dari per dusun. Dari dusun diangkat ke desa. Di desa nanti dimusyawarahkan dihadiri oleh bapak camat.”⁵⁹

Lebih rinci lagi Bapak Heri mengatakan:

“Pertama kali sebelum penyusunan APBDes niku musdus. Pengertian musdus niku musyawarah dusun. Musyawarah dusun itu perdukuhan, perkamituwan perdusun itu menjaring aspirasi tiap – tiap RT. Kalau di Kediren kan ada 3 Dusun 20 RT. Misalkan Dusun Selungguh itu membawahi RT 01 sampai RT 08. Lha itu minimal Pak RT setiap akhir tahun biasanya membawa aspirasi dituangkan di musdus. Biasanya rapatnya kalau tidak di ndalem kamituwone nggeh di balai desa. Setelah musdus selesai dibawa di desa. Dibawa di desa itu namanya Pra APBDes. Pra APBDes itu hasil – hasil musdus tadi dirapatkan oleh lembaga desa yaitu dengan perangkat dan BPD minimal itu. Lha aspirasi dari RT yang dibawa oleh musdus tadi dipaparkan di lembaga dilihat lagi mbak apakah masuk dalam visi misi Kepala Desa nopo mboten. Kan visi misinya ada setiap 5 tahun terus harus masuk dalam rancangan kerja 5 tahunan niku pun masuk nopo dereng. Nek memang sampun masuk di dalam pra niku langsung di acc oleh lembaga tapi kalau belum masuk dalam rancangan 5 tahunan tadi itu masih dicarikan mana yang diprioritaskan mana yang lebih penting. Penyusunan per tahun biasanya bulan Oktober-November. Terus nanti pra nya awal Desember nanti penetapannya APBDes akhir Desember tahun anggaran sebelumnya misalnya 2021 ini penetapan APBDes akhir Desember 2020 biasanya ngoten.”⁶⁰

Dalam proses perencanaan pemerintah desa melakukan secara tertib dan terencana dengan mengadakan pertemuan bersama antara lain musyawarah dusun, musyawarah desa, dan musrenbangdes.

⁵⁹ Wawancara, Ibu Yuliana selaku Sekretaris Desa pada Selasa, 16 Maret 2021

⁶⁰ Wawancara, Bapak Heri selaku Kepala Desa pada Senin, 22 Maret 2021

Musyawarah Pra APBDesa dihadiri oleh lembaga perangkat dan lembaga desa. Lembaga desa terdiri dari Kasun, RT, RW, LPM, BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, Karang Taruna, PKK, pihak kecamatan dan semua perangkat ada. Hasil musyawarah berupa RKPDesa yang akan dibuat RAPBDesa.

Tambahan oleh Ibu Kasmiasi mengenai pengelolaan keuangan desa bahwa:

“Pertama kan RPJM 6 tahun. Terus setelah itu mencari di RPJM tahun ke 3. Mbah lurah kan sudah periode 3 tahun. Iku uange buat apa dibuatkan RKPDes. Dari RKPDes dirapatkan lagi dibentuk Pra APBDes. Lha nek Pra APBDes sudah disetujui ditetapkan jadi APBDes. Jalurnya gitu mbak, tapi sumbernya pertama RPJMDes > RKPDes > Pra APBDes > APBDes.”⁶¹

Berdasarkan informasi yang diperoleh tahap perencanaan membuat RPJMDes kemudian pemilihan prioritas kegiatan pada RKP. Tahap selanjutnya setelah RKP yaitu sekretaris desa menyusun RAPBDesa, terakhir APBDesa berupa rencana program yang akan direalisasikan. APBDes harus dibahas seta disepakati dengan Badan Permusyawaratan Desa. Seperti wawancara berikut:

“Rancangan itu intern perangkat, lha itu disodorkan di BPD terus nanti kan BPD mungkin evaluasi ini. Kalau bisa dipending, dipending kalau ini prioritas gitu mbak.”⁶²

“Biasanya disini malah rapat langsung lho mbak. Ada BPD, RT, RW, LPM terus RKPDes itu disampaikan langsung. Ada pemerintah desa lengkap termasuk Muspika Kecamatan.”⁶³

“Dibahas sama BPD.”⁶⁴

⁶¹ Wawancara, Ibu Kasmiasi selaku Bendahara Desa pada Senin, 22 Maret 2021

⁶² Wawancara, Bapak Heri selaku Kepala Desa pada Senin, 22 Maret 2021

⁶³ Wawancara, Ibu Kasmiasi selaku Bendahara Desa pada Senin, 22 Maret 2021

Dilihat dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan anggaran bisa dibidang partisipasi masyarakat baik. Ditinjau dari beberapa informan sebagai berikut:

“Partisipasi masyarakat baik di Kediren, koperatif mulai dari perencanaan sampai eksekusi baik, koperatif.”⁶⁵

“Masyarakat mendukung. Waktu pembangunan juga masyarakat membantu kerja bakti.”⁶⁶

Program kegiatan yang berasal dari APBDesa diambil dari berbagai usulan masyarakat. Hasil perencanaan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah dalam membangun desa selama setahun. Sehingga perencanaan yang disepakati harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh warga dan bisa dipertanggungjawabkan.

b. Pelaksanaan

Pertanyaan pertama adalah apa seluruh pemasukan serta pembayaran dilakukan lewat rekening kas desa.

“Betul, semua pengeluaran serta pemasukan lewatnya rekening. Semua keuangan lewatnya rekening mbak.”⁶⁷

“Iya selalu rekening. Masuk ke rekening desa.”⁶⁸

“Tetep melalui rekening desa mbak.”⁶⁹

⁶⁴ Wawancara, Ibu Yuliana selaku Sekretaris Desa pada Selasa, 16 Maret 2021

⁶⁵ Wawancara, Bapak Heri selaku Kepala Desa pada Senin, 22 Maret 2021

⁶⁶ Wawancara, Ibu Kasmiati selaku Bendahara Desa pada Senin, 22 Maret 2021

⁶⁷ Wawancara, Ibu Kasmiati selaku Bendahara Desa pada Senin, 22 Maret 2021

⁶⁸ Wawancara, Bapak Heri selaku Kepala Desa pada Senin, 22 Maret 2021

⁶⁹ Wawancara, Ibu Yuliana selaku Sekretaris Desa pada Selasa, 16 Maret 2021

Dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran Desa Kediren seluruh pemasukan serta pembayaran dilakukan lewat rekening kas desa.

Pertanyaan selanjutnya bagaimanakah tata cara pencairan APBDesa.

Bapak Heri mengatakan:

“Prosedurnya kalau itu kan anggaran dari pusat mungkin masuk di Kabupaten. Terus oleh tim verifikasi Kabupaten kalau desa itu persyaratannya sudah memenuhi syarat. Dalam arti persyaratan itu ya kelengkapan administrasi, pekerjaan sudah selesai baru dikirim di rekening unit bank masing – masing. Nah setelah itu dari tim Kecamatan memfasilitasi untuk mengabari ke desa kalau uang itu cair sudah masuk rekening. Terus dari desa itu ngambilnya sesuai kebutuhan. Pengambilannya uang Kepala Desa dan bendahara.”⁷⁰

Tahap pencairan anggaran selama setahun ada 3 kali. 40% pada bulan April. 40% bulan Agustus. 20% pada bulan November.

Sesuai dari hasil wawancara bahwa:

“Biasanya pencairannya 3 kali. Kalau 2020 tiga kali pencairan. Tahapannya antara pencairan pertama dan kedua itu minimal kalau mau mencairkan tahap kedua itu tahap pertama harus selesai dulu baik itu keuangan dan administrasi atau SPJ, bisa dikatakan SPJ.”⁷¹

“Biasanya di tahun 2020 3 tahap, 3 termin.”⁷²

⁷⁰ Wawancara, Bapak Heri selaku Kepala Desa pada Senin, 22 Maret 2021

⁷¹ *Ibid*, Wawancara, Bapak Heri selaku Kepala Desa

⁷² Wawancara, Ibu Yuliana selaku Sekretaris Desa pada Selasa, 16 Maret 2021

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas bahwa syarat pencairan dana di Desa Kediren sesuai dengan petunjuk teknis dan bertahap dari pemerintahan pusat hingga ke desa.

Adapun mekanisme pengajuan pendanaan oleh pelaksanaan kegiatan berdasarkan pernyataan narasumber berikut:

“Mungkin dalam pengerjaan pelaksanaan niku ada namanya timlak. Alurnya dari timlak itu kan setiap hari Kamis diadakan konferensi. Itu kita ngobrol setelah APBDes yaa, uang cair masuk rekening. Setiap Kamis kan konferensi di desa niku diadakan perangkat semua. Lah timlak bilang di bendahara dan kepala desa apa yang dicairkan dulu. Nah setelah itu bikin SPP. Bikin SPP itu bendahara bilang ke kepala desa untuk mencairkan, setelah itu dicairkan. Lha uang yang diambil kepala desa dan bendahara itu dikasih ke timlak untuk dikerjakan. Alurnya gitu mbak.”⁷³

“Iya, itu namanya SPP kegiatan. Biasanya kan kalau sudah APBDes kaya gini, misalnya bidang pembangunan timlak nya siapa. Itu kan sudah punya catatan uang pembangunan buat apa. Itu timlak nya mengajukan buat tulisan, “Bu aku minta uang pembangunan buat ini...” Timlak mengajukan pengajuan perincian uang buat apa terus dikasih ke bendahara. Bendahara baru mencairkan uang ke Bank.”⁷⁴

Mengenai pengajuan anggaran oleh timlak di Kediren dimulai dari masing – masing (timlak) meminta ke bendahara yang dibutuhkan apa dituangkan di SPP (Surat Perintah Pembayaran). Proses selanjutnya, bendahara membuat kwitansi diverifikasi kepala desa sama sekretaris desa. Lalu bendahara desa akan mencairkan uang ke Bank dan dikasih ke timlak. Setelah itu timlak

⁷³ Wawancara, Bapak Heri selaku Kepala Desa pada Senin, 22 Maret 2021

⁷⁴ Wawancara, Ibu Kasmianti selaku Bendahara Desa pada Senin, 22 Maret 2021

mengerjakan atau membelanjakan barang dan jasa. Di akhir pelaksanaan harus membuat laporan pertanggungjawaban atau SPJ.

c. Penatausahaan

Pertanyaan pertama adalah apa yang perlu disiapkan bendahara untuk tahap penatausahaan.

Ibu Kasmiasi selaku bendahara desa mengatakan bahwa:

“Nomor satu APBDes. Pakai aplikasi sistem siskeudes itu semua sudah berada di dalamnya. Termasuk BKU, Buku Bantu, Buku Pajak, Buku Tunai semua ada Buku Bank jadi lebih detail. Siskeudes itu online. Jadi digarap disini dibuka sudah sampai Jakarta. Semua administrasi keuangan itu berdasarkan sistem aplikasi siskeudes online. Jadi garap disini tapi dibuka di Jakarta sudah sampai.”⁷⁵

“Kalau dokumen itu mungkin yang paling penting itu SPJ terus buku pajak terus print out rekening soalnya itu harus sama, dineracakan gitu lho mbak.”⁷⁶

Dapat diketahui bahwa Desa Kediren sudah memakai sistem keuangan online sehingga dapat mempermudah pengelolaan APBDesa. Bendahara juga wajib melaporkan keuangan kepada kepala desa setelah selesai kegiatan. Dibuktikan dengan pernyataan narasumber berikut:

“LPJ.”⁷⁷

“Akhir tahun, itu lunak kadang ya akhir tahun kadang yaa setelah selesai kegiatan.”⁷⁸

⁷⁵ Wawancara, Ibu Kasmiasi selaku Bendahara Desa pada Senin, 22 Maret 2021

⁷⁶ Wawancara, Bapak Heri selaku Kepala Desa pada Senin, 22 Maret 2021

⁷⁷ Wawancara, Ibu Kasmiasi selaku Bendahara Desa pada Senin, 22 Maret 2021

d. Pelaporan

Pertanyaan pertama adalah apa saja LPJ yang dibuat pemerintah Desa Kediren.

“Kalau laporan yaa SPJ mbak yang paling utama. SPJ kan itu luas.”⁷⁹

“Laporannya biasanya laporan realisasi APBDes, LPPD, LKPD ya 3 itu mbak.”⁸⁰

Laporan pertanggungjawaban yang harus disediakan pemerintah desa bagi pemakai laporan keuangan adalah laporan realisasi APBDes, LPPD dan LKPD. Prosedur dalam membuat laporan yaitu, dari tim pelaksana (timlak) diserahkan kepada bendahara untuk dibuat LPJ anggaran yang terpakai. Hal tersebut sesuai dengan pendapat narasumber yang menyatakan bahwa:

“Laporan penyusunan realisasi itu dari timlak – timlak tadi terus bendahara itu diverifikasi oleh sekdes.”⁸¹

“Kalau ini bendahara yang buat sama operator siskeudes yaa termasuk sama sekdes juga mbak. Pokok kan semua kegiatan setahun itu dilaporkan dalam laporan akhir tahun.”⁸²

LPJ dari penggunaan anggaran disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian Kades menyampaikan kepada

⁷⁸ Wawancara, Bapak Heri selaku Kepala Desa pada Senin, 22 Maret 2021

⁷⁹ *Ibid*, Wawancara, Bapak Heri selaku Kepala Desa

⁸⁰ Wawancara, Ibu Kasmiasi selaku Bendahara Desa pada Senin, 22 Maret 2021

⁸¹ Wawancara, Bapak Heri selaku Kepala Desa pada Senin, 22 Maret 2021

⁸² Wawancara, Ibu Kasmiasi selaku Bendahara Desa pada Senin, 22 Maret 2021

Bupati melalui Camat. Berdasarkan hasil wawancara yang menyatakan bahwa:

“Kalau pas rapat yaa kepada kepala desa tapi disaksikan oleh BPD, tokoh masyarakat, Muspika. Kalau laporannya biasanya dikirim ke Bupati Magetan.”⁸³

“Itu biasanya dirapatkan di LKPJ Desa mbak. Itu yang diundang lembaga desa didatangi forkombincam ada itu. Kalau laporan itu tertuang di buku. Desa setor di Kecamatan.”⁸⁴

“Ke Kepala Desa, BPD terus Bupati.”⁸⁵

Menurut hasil penelitian, bahwa sekretaris beserta bendahara desa sudah membuat LPJ kemudian diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan Kecamatan terus Bupati. Dalam tahap ini Desa Kediren telah melaporkan sesuai peraturan yang berlaku.

Namun mengenai pelaporan akhir belum sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri no. 113 tahun 2014 yang terakhir penyampaian Januari tahun selanjutnya. Di Desa Kediren laporan pertanggungjawaban diserahkan kepada Bupati akhir Maret 2021. Dengan bukti wawancara di bawah:

“Di akhir bulan Maret. Umpama tahune 2020 pelaporannya di 2021 bulan Maret. Kadang ada terlambat, kadang – kadang tepat waktu.”⁸⁶

“Kalau jadwal dari Magetan sampai Maret.”⁸⁷

⁸³ *Ibid*, Wawancara, Ibu Kasmiasi selaku Bendahara Desa

⁸⁴ Wawancara, Bapak Heri selaku Kepala Desa pada Senin, 22 Maret 2021

⁸⁵ Wawancara, Ibu Yuliana selaku Sekretaris Desa pada Selasa, 16 Maret 2021

⁸⁶ Wawancara, Ibu Yuliana selaku Sekretaris Desa pada Selasa, 16 Maret 2021

⁸⁷ Wawancara, Ibu Kasmiasi selaku Bendahara Desa pada Senin, 22 Maret 2021

Sehingga tahap pelaporan di Desa Kediren sesuai petunjuk yang berlaku, tetapi ada keterlambatan saat penyampaian laporan semester akhir tahun karena menyesuaikan jadwal dari pemerintah Kabupaten Magetan.

e. Pertanggungjawaban

LPJ adalah laporan yang harus disediakan di akhir tahun. Tahap pelaporan diantaranya ke Bupati atau Walikota, Badan Permusyawaratan Desa, pemerintahan desa juga berkewajiban menyampaikan ke warga desa. Berdasarkan hasil wawancara berikut:

“Yaa pas rapat kan ada perwakilan yang diundang kan mbak, RT, RW, BPD, tokoh masyarakat. Ya itu laporan pertanggungjawaban desa kepada masyarakat diwakili oleh BPD dan tokoh masyarakat.”⁸⁸

“Itu LKPJ tadi yang awal tahun baru itu yang diundang termasuk masyarakat ada, tokoh masyarakat tokoh agama.”⁸⁹

Sehingga saat musyawarah desa (musdes) mengundang Kasun, RT, RW, BPD, tokoh masyarakat dan tokoh agama di kantor Desa Kediren. Kemudian setiap perwakilan menginformasikan ke warga dusun.

Cara lain yang bisa dilakukan (yang perlu di publish) juga disampaikan melalui banner yang berisi mengenai rincian

⁸⁸ *Ibid*, Wawancara, Ibu Kasmianti selaku Bendahara Desa

⁸⁹ Wawancara, Bapak Heri selaku Kepala Desa pada Senin, 22 Maret 2021

pendapatan dan belanja Desa Kediren. Tetapi untuk media sosial secara online belum. Sesuai dengan pernyataan informan berikut:

“Kalau sementara ini Desa Kediren belum mbak. Medianya pakai baleho tadi kalau media sosial belum.”⁹⁰

“Melalui banner.”⁹¹

Pelaporan disini sesuai dengan LPJ akhir tahun 31 Desember di setiap tahunnya. Namun masih terlambat saat menyampaikan LPJ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pelaporan disampaikan pada akhir bulan Maret tahun 2021. Berdasarkan hasil wawancara di bawah:

“Pertanggungjawabannya ya iku mbak di bulan Maret. Grup e LPJ, laporan Kepala Desa ke BPD trakhir tanggal 31 Maret.”⁹²

Pemerintah Desa Kediren berusaha bertanggungjawab dalam pelaporan kegiatannya kepada pihak yang lebih atas meskipun ada keterlambatan dalam pelaporan. Kalau kepada masyarakat dilakukan dengan rapat mengundang perwakilan dan melalui papan pengumuman.

⁹⁰ *Ibid*, Wawancara, Bapak Heri selaku Kepala Desa

⁹¹ Wawancara, Ibu Yuliana selaku Sekretaris Desa pada Selasa, 16 Maret 2021

⁹² *Ibid*, Wawancara, Ibu Yuliana selaku Sekretaris Desa

2. Kendala dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kediren

Saat pelaksanaan program atau kegiatan baik dari segi pengelolaannya, pertanggungjawaban maupun pencairan dana APBDesa pasti ada kendala, menyebabkan proses pengelolaan APBDesa tidak maksimal. Setiap Desa memiliki kendala yang berbeda-beda, tergantung bagaimana Pemerintah Desa mengambil peran dalam mengatasi hal tersebut. Dari hasil pengamatan dan juga wawancara yang sudah dilakukan, ditemukan kendala yang sering dialami oleh pemerintah desa Kediren dalam pengelolaan APBDesa berdasarkan penjelasan dari beberapa informan.

Adapun kendala menurut Ibu Kasmiasi ialah:

“Yaa ada yaa maklum. SDM nya perangkat desa kan tidak hafal ya mbak, tidak sarjana tapi cuma menang pengalaman. Tapi kalau sudah ditanyakan IT pengalaman saja tidak cukup. Soalnya apa – apa ini aplikasi. Apalagi online. Jadi semua sekarang harus aplikasi itu lho mbak. Jadi yaa SDM nya kurang. Terus ada pelatihan – pelatihan. Pelatihan diadakan tapi yaa tetep kurang soalnya sudah tua, dilatih kalau pegang yaa ingat setelah pegang kadang lupa. Itulah kendalane.”⁹³

Seperti penjelasan Ibu Kasmiasi kurangnya kualitas sumber daya manusia karena perangkat desa tidak semuanya sarjana. Usia perangkat desa juga menyebabkan lambatnya dalam mengelola data menggunakan

⁹³ Wawancara, Ibu Kasmiasi selaku Bendahara Desa pada Senin, 22 Maret 2021

teknologi. Sedangkan pengerjaan semua laporan saat ini serba digital atau online.

Kemudian peneliti menanyakan tentang kendala yang sering dihadapi oleh Pemerintah Desa Kediren dalam pengelolaan APBDesa.

Bapak Heri mengatakan:

“Kalau kendala biasanya kan roda perjalanan pemerintahan setiap hari pasti ada mbak yaa. Lah kendalanya dana desa cairnya tidak tepat waktu di bulan atau di awal tahun. Lha mungkin dana desa itu cairnya biasanya bulan 3 bulan 4. Lah selama bulan 1 sampai bulan cairnya tadi bulan 3 atau 4 biasanya untuk operasional di desa itu nombok i gitu lho minjami. Kendalanya itu mbak.”⁹⁴

Tambahan dari Ibu Yuliana:

“Kendalanya kadang uang e mbak. Proses pencairan tidak keluar – keluar jadi yang nombok i desa. Kadang di awal tahun kaya gini kan sudah berjalan tapi belum keluar.”⁹⁵

Ibu Kasmiasi menambahkan:

“Terus uang cair kemepeten, akhirnya sudah sesuai jadwal.”⁹⁶

Dari penjelasan tersebut, pemerintahan desa sepakat bahwa waktu pencairan dana desa yang tidak tepat waktu awal tahun sebagai kendala.

Peneliti juga bertanya terkait dengan kendala saat ada perubahan peraturan dari pemerintah. Bapak Heri mengatakan:

“Kalau kendala itu mungkin gini mbak, mungkin dari awal rencana APBDes itu ada penganggaran suatu contoh penganggaran pemberdayaan di bidang Bumdes misalnya

⁹⁴ Wawancara, Bapak Heri selaku Kepala Desa pada Senin, 22 Maret 2021

⁹⁵ Wawancara, Ibu Yuliana selaku Sekretaris Desa pada Selasa, 16 Maret 2021

⁹⁶ Wawancara, Ibu Kasmiasi selaku Bendahara Desa pada Senin, 22 Maret 2021

perbantuan modal. Terus setelah berjalannya waktu mungkin pemerintah merubah aturan contohnya ini di 2021 kan ada covid itu harus dianggarkan kalau tidak salah 8% dari dana desa harus dibuat wadah tentang covid, makanya itu harus ada yang dicoreti dimasukkan di itu. Kesulitannya yaa itu mbak peraturannya berubah – ubah.”⁹⁷

Tambahan oleh Ibu Kasmiasi terkait perubahan peraturan yakni:

“Kendalanya kalau seperti ini, belum dilaksanakan aturan dari atas sudah ganti. Ada covid ini kan setiap saat ada perubahan harus merubah. Seperti ini pagu anggaran keluar, APBDes ditetapkan. Desember yaa, APBDes 2021 ditetapkan ini Februari sudah rubah mbak, harus sekian persen dana untuk covid. Dirubah rapat lagi PAK ngundang lembaga sama Muspika. Ini rapat belum dilaksanakan sudah ada perubahan lagi uang ADD turun. Tapi ini belum sampai rapat. Bingung kadang desa itu, uang belum turun saja sudah ganti.”⁹⁸

Ibu Yuliana menjelaskan:

“Bingung mbak kadang di plot – plot.”⁹⁹

Berdasarkan pernyataan dari narasumber diatas masalah timbul dari pusat. Kebijakan pusat tentang peraturan pengelolaan APBDesa setiap tahunnya selalu berubah. Apalagi ada covid – 19, PAK tahun 2020 sampai 3 kali perubahan. Perubahan seperti itu menjadikan pemerintah desa mengalami kebingungan karena sudah dianggarkan untuk kegiatan harus dirubah lagi. Namun perangkat desa harus selalu menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang ada.

⁹⁷ Wawancara, Bapak Heri selaku Kepala Desa pada Senin, 22 Maret 2021

⁹⁸ Wawancara, Ibu Kasmiasi selaku Bendahara Desa pada Senin, 22 Maret 2021

⁹⁹ Wawancara, Ibu Yuliana selaku Sekretaris Desa pada Selasa, 16 Maret 2021

3. Upaya untuk Mengatasi Kendala dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kediren

Berdasarkan kendala yang dialami oleh pemerintahan desa Kediren dalam pengelolaan APBDesa, perangkat desa berusaha untuk mengatasi hal tersebut. Untuk masalah pencairan dana yang tidak tepat waktu awal tahun Ibu Yuliana menjelaskan:

“Kalau ada yang punya uang biasanya nombok i dulu. Kalau uang sudah keluar nanti diganti, biasanya ngunu kui. Kadang ATK dll bisa bon di fotocopy, di toko.”¹⁰⁰

Dalam mengatasi pencairan dana yang tidak tepat waktu awal tahun perangkat desa berusaha mengcover anggaran kegiatan dengan uang seadanya. Baru setelah uang cair akan diganti. Untuk mengatasi perubahan peraturan dari pemerintah yang sering terjadi Ibu Kasmiasi memberikan solusi sebagai berikut:

“Yaa dilaksanakan sesuai prosedur yang ada mbak. Sesuai aturan, sesuai petunjuk biar tidak ada kendala. Biar pelaksanaan APBDes bisa berjalan sesuai target.”¹⁰¹

Bapak Heri menambahkan:

“Mengikuti dari pemerintah.”¹⁰²

Pemerintah Desa Kediren berusaha untuk mengikuti perubahan – perubahan yang ada. Dengan melaksanakan sesuai prosedur dan dasar hukum yang berlaku. Agar pelaksanaan APBDesa berjalan sesuai

¹⁰⁰ Wawancara, Ibu Yuliana selaku Sekretaris Desa pada Selasa, 16 Maret 2021

¹⁰¹ Wawancara, Ibu Kasmiasi selaku Bendahara Desa pada Senin, 22 Maret 2021

¹⁰² Wawancara, Bapak Heri selaku Kepala Desa pada Senin, 22 Maret 2021

rencana. Dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kurangnya kemampuan sumber daya perangkat desa antara lain diadakan pelatihan – pelatihan. Seperti bimbingan komputer untuk perangkat desa, sosialisasi, training maupun bimtek dari pihak desa maupun dari kecamatan, dll. Ibu Kasmiasi mengatakan:

“Terus ada pelatihan – pelatihan.”¹⁰³

¹⁰³ Wawancara, Ibu Kasmiasi selaku Bendahara Desa pada Senin, 22 Maret 2021